

**IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA KEARIPAN LOKAL LAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**

(Skripsi)

Oleh

Nekroma



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA KEARIPAN LOKAL LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Negeri Besar kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)

**Oleh
Nekroma**

Desa Negeri Besar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang memiliki nilai budaya kearipan lokal lampung yang terkandung dalam Piiil Pesenggiri prinsip kehormatan selalu berpasangan, juluk berpasangan dengan adok, nemui dengan nyimah, nengah dengan nyappur, sakai dengan sambai. Juluk adek terprogram, keberhasilan, nemui nyimah prinsip ramah, terbuka dan saling menghargai, nengah nyappur prinsip suka bergaul, terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan, dan sakai sambai prinsip kerjasama, kebersamaan.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi Nilai Budaya Kearipan Lokal Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara. Dengan fokus penelitian; (a) Juluk adok, (b) Nemui nyimah, (c) Nengah nyappur dan, (d) Sakai Sambaiyan.

Adapun hasil penelitian ini Kearipan Lokal Lampung nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya. Juluk adok identitas masyarakat lampung dikeluarganya. juluk adok ini akan terus jadi turun temurun, Nemui nyimah menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, Nengah nyappur sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan rasa toleransi yang tinggi antar sesamanya..Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sakai sambaiyan menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Kata Kunci :Implementasi , Kearipan Lokal, Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CULTURAL VALUES LAMPUNG LOCAL WISDOM IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT (Study at Negeri Besar Village, Negeri Besar Sub-district, Way Kanan District)

By

Nekroma

Negeri Besar village is one village in the Negeri besar sub-district, Way Kanan district who have Lampung cultural values of local wisdom contained in Pii Pesengiri the principle of honor always in pairs, Juluk paired with adok, nemui with nyimah, nengah with nyappur, sakai with sambai. Juluk adek programmatic, success, nemui nyimah friendly principles, open and respectful, nengah nyappur principle of gregarious, go to the community, togetherness, equality, and sakai sambai the principle of cooperation, togetherness.

The purpose of this research is to know the Implementation of Cultural Values Lampung Local Wisdom in the Implementation of Village Government in the negeri besar village way kanan district. Type of this research is descriptive research with a qualitative approach. The collected data comes from the interviews. With research focus; (a) Juluk adok, (b) Nemui nyimah, (c) Nengah nyappur dan, (d) Sakai Sambaiyan.

The results of this research Lampung Local Wisdom, the values and norms applicable in a society that is believed to be true. Juluk adok identity of lampung society in the family. Juluk adok will continue to be hereditary. Nemui nyimah creating an attitude of intimacy and harmony and friendship is an obligation for a family of Lampung people in general to maintain a relationship, Nengah nyappur gregarious and friendly attitude foster the spirit of cooperation and a high tolerance with one another. Nengah nyappur describe that Lampung community members prioritizes a sense of kinship does not distinguish the tribe, religion, grade, origin and class. Sakai sambaiyan show a high sense of participation and solidarity to a variety of personal and social activities in general.

Keyword: Implementation, Local Wisdom, Village Government.

**IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA KEARIPAN LOKAL LAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**

Oleh

Nekroma

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

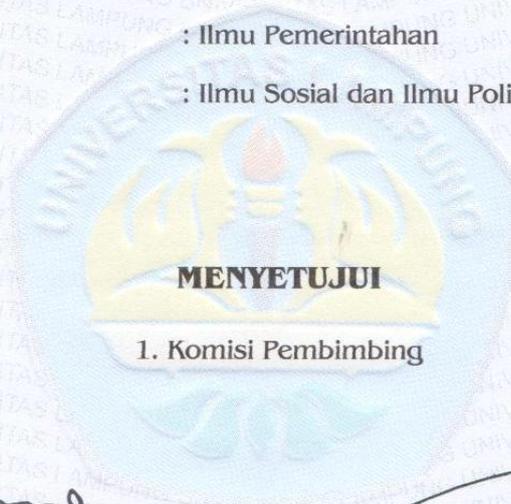
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA
KEARIFAN LOKAL LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (Studi Desa Negeri Besar
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten
Way Kanan)**

Nama Mahasiswa : **Nekroma**

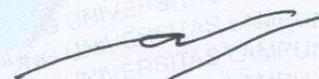
Nomor Pokok Mahasiswa : 1216021082

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

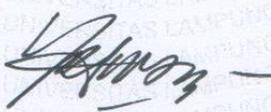
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Drs. Abdul Syani, M.IP.
NIP 19570704 198503 1 025


Andri Marta, S.IP., M.IP.

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

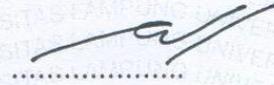
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Abdul Syani, M.IP.



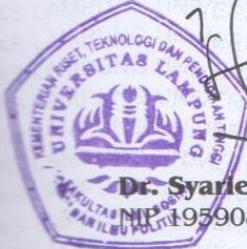
Sekretaris : Andri Marta, S.IP., M.IP.



Penguji Utama : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 April 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, April 2017
Yang membuat pernyataan,



Nekroma
NPM: 1216021082

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Desa Kiling – Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada 29 Juli 1994. Penulis adalah putra pertama pasangan Nasrullah S.Pd dan Mastur Amd, dan merupakan kakak dari Tabroni Dwi Kurniawan, Sabki dan Firmansyah.

Penulis merupakan alumni SDN kiling – killing Kabupaten Way Kanan lulusan tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2009, serta lulusan dari SMAN 14 Bandar Lampung pada tahun 2012. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (UNILA).

Selama melaksanakan kegiatan perkuliahan, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Sari, Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

Penulis menyelesaikan pendidikan dan mencapai sebutan Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari Universitas Lampung (UNILA) pada tanggal 21 April 2017.

“MOTTO”

“Hidup sekali, Hiduplah yang berarti”

*“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya
kesuksesan ketika mereka menyerah”*

(Thomas Alfa Edison)

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Atas segala Rahmat dan Kebesaran-Nya, ku persembahkan karya kecil ini untuk:

Ayahanda Nasrullah, S.Pd dan Ibunda Mastur, Amd. atas kasih sayang yang begitu tulus dan semangat luar biasa yang diberikan, tidak henti hentinya do'a yang di panjatkan, kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar, serta pengertian yang selalu tercurahkan sepenuh jiwa untukku.

Adik-adikku "Tabroni Dwi Kurniawan, Sabki, Wilfin Yuanta, Firmansyah, M. Putra Dinata, Vannesa septiana" Adikku satu – satunya Perempuan dalam Keluarga, serta Yundaku yang telah banyak membantu. Dan keluarga besar yang telah memberikan support yang tiada henti.

ILMU PEMERINTAHAN UNILA 2012

Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan UNILA

Tempatku bernaung dalam menuntut ilmu dan mencari jati diri

"Almamater tercinta, Universitas Lampung".

PRAKATA

Alhamdulillah *alhamdulillah*. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan segala apa yang ada di langit dan di bumi, serta Tuhan semua apa yang ada di antara keduanya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabatnya serta seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah, berjalan di atas manhaj beliau hingga Hari Kiamat.

Keberhasilan penyusunan skripsi dengan judul **Implementasi Nilai Budaya Kearifan Lokal Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)**. adalah bagian dari rahmat-Nya, di samping bantuan dari pihak-pihak yang sangat berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Syani, M.IP., selaku dosen pembimbing utama yang selalu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
2. Bapak Andri Marta, S.IP. M.IP., selaku dosen pembimbing kedua yang selalu membimbing, memberikan saran kritik bagi penulis selama penyelesaian skripsi.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku dosen penguji yang telah menguji penulis dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Arizka WargaNegara S.IP, M.A., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku kepala jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
7. Dosen, staff dan karyawan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta beserta adik-adik tersayang yang tak pernah berhenti memberikan do'a serta motivasi tiada henti kepada penulis.
9. Rekan – rekan jurusan Ilmu Pemerintahan 2012, yang telah menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama untuk : Melyansyah, S.IP., Baihaki, S.IP., Riyan Rinanda GP, S.IP., Yoga Pratama JP, Yoga Swasono, S.IP., Rizky Arie Kurniawan, S.IP, Saiful Zuhri, S.IP., Ananda Putri S, S.IP., M. Fajar Imani, Rangga Perdana S.IP., Yogi Irawan, S.IP., Tecky Prayuda, S.IP., Riski Satria, S.IP.
10. Rekan - rekan Kabupaten Pesisir Barat, antara lain : Jeki Rahman, Devolta Diningrat, Murdani, Rangga Perdana dan teman teman lainnya yang telah memberi semangat dan doa demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Rekan - rekan KKN 2015 yang telah banyak memberikan pengalaman berbagi ilmu selama 40 hari terutama bang Franshaniago S.P., Husen

Manalu S.T., I Made Agung S.E., Septian Adi Saputra S.T., Rani Wijayanti S.P., Santi S.P., Mufli Hatus salamah S.P., Indrawasih Dyah S.Ked., Alvira S.Ked., Dwi fajar S.Kom., Azizah S.AN., Olla S.Hut.

12. Seluruh teman - teman kkn kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat terimakasih untuk salam perkenalannya selama proses Kuliah kerja nyata.
13. Terimakasih juga kepada kepala desa Negeri besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan waktu dan kesedian dalam penelitian saya ini serta Tokoh Adat Desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kepala dusun dan masyarakat setemat terimakasih banyak atas kerja samanya, serta doa yang saya panjatkan kepada beliau - beliau ini agar selalu sehat jasmani atau rohaninya agar dapat melayani masyarakat dengan semangat teloransi.
14. Serta seluruh pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis serta Universitas Lampung pada khususnya.

Bandar Lampung, April 2017

Nekroma

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tentang Implementasi	12
B. Konsep Nilai Budaya Kearifan Lokal Lampung	13
1. Konsep Nilai	13
2. Konsep Budaya	17
3. Konsep Kearifan Lokal Lampung	18
C. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22
D. Tugas Pemerintahan Desa.....	25
E. Kerangka Fikir	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Penentuan Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	38
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Kelurahan Negeri Besar.....	40
B. Keadaan Umum Wilayah Kelurahan Negeri Besar	41
1. Luas Dan Batas Wilayah Kelurahan Negeri Besar.....	41
2. Orbitrasi Kelurahan Negeri Besar	42

C. Keadaan Penduduk Kelurahan Negeri Besar	43
1. Keadaan Penduduk Umum	43
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama.....	44
3. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur	44
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian.....	45
5. Sarana Dan Prasarana Kelurahan Negeri Besar.....	46
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
1. Deskripsi Identitas Informan	49
2. Implementasi Nilai Budaya Kearifan Lokal Lampung	51
3. Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	65
4. Implementasi Kearifan Lokal Piiil Pesenggiri Dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa	68
B. Pembahasan.....	72
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	85
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama Kepala Desa Negeri Besar	41
2. Batas Wilayah Desa Negeri Besar	42
3. Jumlah Penduduk Desa Negeri Besar Menurut jenis kelamin	43
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut	44
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur	45
6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	46
7. Jumlah Sarana dan Prasarana	47
8. Matriks pembahasan	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	30
2. Peta Kabupaten Way Kanan.....	42

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan memiliki keragaman budaya. Ada banyak ragam kebudayaan di Indonesia, bahkan setiap pulau - pulau di Indonesia dihuni oleh banyak penduduk yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, ras, dan agama. Keanekaragaman tersebut melahirkan adat istiadat dan budaya yang unik di setiap daerahnya. di Indonesia memiliki ciri khas kebudayaan sendiri, seperti kebudayaan yang ada di pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia.

Wilayah Lampung yang merupakan pintu gerbang pulau Sumatra memiliki beragam adat budaya salah satunya masyarakat Lampung memiliki budaya dan adat istiadat yang unik adapun keunikan itu sendiri Piil Pesenggiri orang Lampung berikut nilai – nilai yang terkandung dalam Piil Pesenggiri itu sendiri, kemudian anjau silau merupakan kegiatan dalam rangka silaturahmi antara pejabat setempat dengan masyarakatnya, masih banyak lainnya tentang keunikan budaya orang Lampung. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Pada Tanggal 18 Maret dengan PERPU No. 3/1964, suku Lampung adalah penduduk yang mendiami wilayah propinsi Sumatera Selatan yang terletak

diujung pulau sumatera bagian selatan (Departemen P & K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Adat Istiadat Daerah Lampung).

Masyarakat Lampung dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu masyarakat yang menganut adat pepadun dan masyarakat ini memiliki adat istiadat yang khas sesuai dengan kebiasaan masing-masing, dan masyarakat Lampung mempunyai dua rumpun bahasa yaitu, berdialek “api” dan berdialek “nyow” (apa) (Hilman Hadikusuma, 2003 : 85).

Berdasarkan adat istiadatnya penduduk asli suku Lampung terdiri dari dua kelompok, yaitu masyarakat Lampung beradat Pepadun yang berada di daerah pedalaman dan masyarakat Lampung beradat Saibatin atau Peminggir yang berada di daerah pesisir. Masyarakat Lampung Pepadun terbagi dalam perserikatan-perserikatan adat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Abung Siwou Megou (Abung Sembilan Marga) yang meliputi tanah wilayah Way Abung (Lampung Utara), Way Rarem, Way Terusan, Way Pengubuan dan Way Seputih
2. Megou Pak Tulang Bawang (Marga Empat Tulang Bawang) yang meliputi : Wilayah tanah Tulang Bawang Ilir yaitu Marga Tegamoan, Marga Buay Bulan, Marga Suay Unpu dan MargaAji
3. Buway Lima Way Kanan dan Sungkai (lima keturunan Way Kanan) meliputi daerah di Way Kanan dan Way Sungkai
4. Pubiyan Telu Suku (Pubiyan Tiga Suku) meliputi daerah Way Sekampung Tengah dan Way Sekampung Ulu.

Masyarakat Saibatin pada umumnya secara kultural mengakui bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Sekala Berak, sebagian menyebar di sepanjang pantai, sebagian bermukim di sekitar perbukitan dan sebagian lagi menyebar di dataran rendah dan pedalaman. Masyarakat adat Saibatin terbagi dari berbagai ragam marga atau kebuawaian (garis keturunan) diantaranya :

1. Sai Batin Masyarakat Kalianda, yang terdiri dari : Marga Ratu, Marga Legun Marga Rajabasa (2 Kepenyimbangan Adat), Marga Dantaran (2 Kepenyimbangan Adat), Marga Katibung (Menyata, Pubian)
2. Sai Batin Masyarakat Bandar Lampung terdiri dari : Sai Batin Marga Lunik, Sai Batin Marga Balak, Sai Batin Marga Bumi Waras Teluk Betung
3. Sai Batin Masyarakat Pesawaran terdiri dari : Sai Batin Punduh (7 Kepenyimbangan Adat), Sai Batin Pedada (8 Kepenyimbangan Adat), Sai Batin Way Lima, Sai Batin Kedundung, Sai Batin Gedung Tataan, Sai Batin Ratai (Sanggi Padang Cermin)
4. Sai Batin Masyarakat Tanggamus terdiri dari : Sai Batin Kelumbayan (dari Paksi Keratuan Semaka), Sai Batin Talang Padang, Sai Batin Marga Pertiwi (dari Paksi Keratuan Semaka), Sai Batin Kuta Agung dan sekitar.
5. Sai Batin Masyarakat Lampung Barat terdiri dari : Sai Batin Ngaras dan Bengkunt, Sai Batin Way Suluh, Sai Batin Ngambur, Sai Batin Pugung, Sai Batin Penggawa Lima (Pesisir Tengah)

Kearifan lokal itu sendiri mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka nanti, sehingga prinsip mentradisi akan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. ada beberapa perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya dapat terjalin secara bersama, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dengan bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Nilai-nilai budaya itu saat ini mulai luntur, sehingga kearifan lokal kehilangan maknanya sebagai kearifan yang melekat. Upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa pada akhir-akhir ini budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekedar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan.

Menurut Abdulsyani (2013) menjelaskan bahwa kearifan lokal Lampung sendiri adalah prinsip hidup Piil Pesenggiri. Piil senggiri merupakan segala sesuatu yang menyangkut nilai kehormatan, perilaku yang luhur dalam nilai dan maknanya, sikap hidup dan menjaga dan menegakan nama baik, martabat secara pribadi maupun kelompok.

Adapun unsur- unsur dibawah ini yang menyangkut tentang hal “Piil Pesenggiri” itu sendiri prinsip kehormatan selalu berpasangan, juluk berpasangan dengan adok, nemui dengan nyimah, nengah dengan nyappur, sakai dengan sambai. Penggabungan itu bukan tanpa sebab dan makna. Juluk adek (terprogram, keberhasilan), nemui nyimah (prinsip ramah, terbuka dan saling menghargai), nengah nyappur (prinsip suka bergaul, terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan), dan sakai sambaian (prinsip kerjasama, kebersamaan).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu endang selaku Pejabat Sementara (Pjs) kepala kampung desa negeri besar pada tanggal 3 juni 2016, di ketahui bahwa mayoritas masyarakat suku Lampung di desa negeri besar adalah masyarakat Lampung way kanan yang merupakan masyarakat Lampung yang beradat pepadun, masyarakat Lampung beradat pepadun maupun saibatin/pesisir/peminggir, keduanya memiliki falsafah hidup yang sama yaitu Piil Pesenggiri yang merupakan salah satu dari budaya masyarakat Lampung.

Penyelenggaraan nilai kearifan lokal budaya Lampung dalam pemerintahan desa yaitu piil pesenggiri masyarakat Lampung yang terbuka terhadap orang lain dan bisa bersikap baik kepada orang lain asalkan orang tersebut tidak mengancam harga dirinya. Disisi lain berjalan suatu pemerintahan dikarenakan adanya aturan yang di terapkan ke daerah masing-masing dan adanya budaya adat istiadat di dalam masyarakat yang melekat sejak lahir.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari miniature Indonesia. Desa yang terkadang dipandang sebelah mata ternyata memiliki potensi dalam menopang keberlangsungan suatu negara. Kondisi tersebut akan tercapai apabila desa benar-benar diperhatikan dan terus tumbuh kembangkan, bukan sebaliknya desa terus dieksploitasi baik itu sumber kekayaan alam sebagai pemasok bahan mentah dan pengeksploitasi sumber tenaga kerja yang murah.

Pemerintah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.

Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, Pelayanan Prima diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelayanan prima dapat terlaksana jika aparatur pemerintah mampu menjalankan *good governance* dengan baik melihat dari pendekatan melalui Pengukuran organisasi yang terdiri dari :

- a. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian pada output adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

- b. Pendekatan sumber (*recourse approach*) yakni mengukur organisasi dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- d. Pendekatan integrative (*integrative approach*) yakni pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output.

Penyelenggaraan budaya Lampung di Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupten Way Kanan masih menerapkan unsur – unsur budaya yaitu dimana masyarakat masih menerapkan budaya lampung dalam kehidupan sehari – hari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terbukti pada pelaksanaan musyawarah desa atau rapat desa, sebagai contoh pada unsur bahasa, perangkat desa dan masyarakat desa Negeri Besar adalah bersuku lampung masih menggunakan bahasa lampung dalam berkomunikasi pada pelaksanaan musyawarah atau rapat desa. (Wawancara via telpon kepada bapak suhardi selaku sekretaris desa).

Pada pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa sebuah kejadian yang terjadi pada masyarakat desa negeri besar blok 2 kecamatan negeri besar seorang warga yang bernama Rudi Hartono (30) mengaku bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat desa sangat lah kurang efektif dan lambat yang ada di desa negeri besar khususnya dalam pelayanan umum, seperti waktu pengerjaan

yang diundur-undur, yang membuat kerugian waktu. berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat negeri besar bapak Rudi Hartono dilakukan hari selasa tanggal 16 agustus 2016 pukul 16.00 wib mengatakan bahwa :

“Buat KTP sama kartu keluarga dari bulan april sampai sekarang belum ada kejelasan kapan jadinya. Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi sudah saya berikan, Tapi sampai sekarang belum ada jawaban kapan jadinya KTP sama KK itu juga alasannya kenapa belum jadi-jadi sampai sekarang.”

Bapak Rudi Hartono membuat kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah dari 3 bulan lebih lamanya tak kunjung juga membuahkan hasil. Sebelum ke kantor kecamatannya, beliau bertanya dahulu kepada Ketua Dusun blok 2 desa negeri besar, lalu dilimpahkan lagi ke kantor kecamatan, dan sampai sekarang Bapak Rudi Hartono belum mendapatkan kepastian selesainya pembuatan KTP tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahwa pelayanan yang di lakukan kurang begitu baik, selain itu kepastian waktu dan pertanggungjawaban yang diabaikan, yang idealnya dilakukan oleh instansi pemerintah pelayanan publik tidak didapatkan oleh masyarakat, khususnya Bapak Rudi Hartono ini sebagai masyarakat yang merasakan hal tersebut.

Permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam penyaluran beras miskin yang dinilai kurang tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Terlihat dengan adanya masyarakat mana yang berhak mendapatkan Raskin dan yang tidak berhak mendapatkan Raskin sehingga sering kali aparat desa memanfaatkan keadaan sebagai contoh untuk mendapatkan raskin masyarakat harus dihitung dari biaya yang ditetapkan oleh aparat desa sehingga banyak masyarakat yang berhak mendapat bantuan raskin terkendala oleh biaya.

Aparatur pemerintah sudah sepantasnya melaksanakan kewajibannya seperti berperilaku ramah-tamah, santun serta melayani dengan tulus ikhlas. Aparatur merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan *good governance* diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Selanjutnya pembangunan desa yang ada di desa tersebut boleh dikatakan maju dari desa-desa lain apabila dari segi masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai kearifan lokal budaya dan pemerintahan daerah, dikarenakan pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Seharusnya nilai – nilai kearifan lokal piil pesenggiri sebagai prinsip hidup masyarakat adat Lampung khususnya di desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar diterapkan sebagai landasan perilaku dalam pelayanan publik. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan dengan nilai – nilai budaya lokal lampung sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari saudara Niken Nila Prastuti berjudul Analisis implementasi budaya jawa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan dalam penelitian ini penulis melihat dari implementasi nilai budaya kearifan lokal Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari perkembangan nilai budaya Lampung, pelayanan, serta aparat desa dan masyarakat khususnya dan didukung oleh pemerintah daerah.

Sebuah kehidupan menentukan kualitas maupun kuantitas pemerintah itu sendiri untuk menjalankan pemerintahan maka dibentuk lembaga-lembaga pemerintah dewasa ini kita sering melihat secara nyata, lembaga pemerintahan mulai dari yang atas sampai dibawah terpengaruh budaya daerah asal masing masing daerah. begitu pula budaya melekat dalam setiap jiwa para aparatur pemerintah desa yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja serta karakter aparatur dalam menjalankan pemerintahan.

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara sementara dengan Pak Ahmad Darwis beliau masyarakat tokoh adat di desa negeri besar. diketahui realitas dan kenyataan yang terjadi bahwa piil pesenggiri belum di adopsi sebagai salah satu pedoman perilaku dalam pelayanan prima. Disisi lain prinsip – prinsip pendekatan dalam pelayanan pemerintahan desa sendiri belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan *good governance*. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Nilai Budaya Kearifan Lokal Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi (Penerapan) Nilai Budaya Kearifan Lokal Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai budaya kearifan lokal Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian tentang implementasi nilai budaya kearifan lokal lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa negeri besar kabupaten way kanan

2. Secara Praktis,

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan serta memberikan masukan bagi instansi pemerintah desa yang ada di desa kecamatan negeri besar kabupaten way kanan dan masyarakat khususnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2004: 65). Menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Kusnadi (2002: 247) menjelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah perwujudan dalam tindakan dari rencana yang telah digariskan guna mencapai tujuan atau target organisasi yang telah digariskan. Implementasi merupakan bagian dari rencana yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Implementasi diartikan sebagai sebuah proses pelaksanaan (aktivitas pelaksanaan) suatu tata nilai berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan maka implementasi dapat diartikan bagian dari rencana yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan aktivitas suatu tata nilai berdasarkan kesepakatan bersama. Berkaitan dengan konteks penelitian ini,

sejauh mana Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Ke Arian Lokal Budaya Lampung.

B. Konsep Nilai Budaya Kearipan Lokal Lampung

1. Konsep Nilai

Nilai dalam bahasa Inggris *value*, sedangkan dalam bahasa Latin *valere* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.

Menurut Koentjaraningrat (1987:85) mengatakan bahwa nilai terdiri dari konsepsi – konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal – hal yang mereka anggap amat mulia. tentang apa yang dianggap baik, penting, diinginkan, dan dianggap layak. Sekaligus tentang yang dianggap tidak baik, tidak penting, tak layak diinginkan dan tidak layak dalam hal kebudayaan. Nilai menunjuk pada hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (1996: 176) nilai adalah sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dengan demikian nilai adalah segala hal yang dianggap baik dan dihargai dalam masyarakat dan juga segala hal yang dianggap buruk dalam masyarakat. Baik buruknya penilaian terhadap perilaku tergantung dengan penerapan budaya masyarakat setempat.

Nilai sebagaimana disini dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang dan kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu obyek, baik material maupun non material. Dalam kehidupan masyarakat Nilai adalah segala hal yang dianggap benar dalam masyarakat. Nilai biasanya sangat berkaitan dengan norma yang berarti aturan. Nilai-nilai dalam masyarakat wajib untuk dipertahankan dan dijunjung tinggi.

Jadi nilai dapat disimpulkan berdasarkan segala hal yang yang dianggap baik dan dihargai dalam masyarakat dan juga segala hal yang dianggap buruk dalam masyarakat. Baik buruknya penilaian terhadap perilaku tergantung dengan penerapan budaya masyarakat setempat.

a. Ciri-Ciri Nilai

Menurut Daroeso, (1986 : 57) nilai memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suatu realitas yang abstrak (tidak dapat di tangkap melalui panca indra akan tetapi ada). Nilai itu ada atau riil dalam kehidupan manusia. Misalnya, manusia mengakui adanya keindahan. Akan tetapi, keindahan sebagai nilai adalah abstrak (tidak dapat diindra). Yang dapat diindra adalah objek yang memiliki nilai keindahan itu. Misalnya, lukisan atau pemandangan.
2. Normatif (yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan).
Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan (das solen) oleh manusia.
Nilai merupakan sesuatu yang baik yang dicita-citakan manusia.

Contohnya, semua manusia mengharapkan keadilan. Keadilan sebagai nilai adalah alternatif.

3. Berfungsi sebagai daya dorong manusia (sebagai motivator).
4. Nilai menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar harapan yang terwujud dalam kehidupannya. Nilai diharapkan manusia sebagai mendorong manusia berbuat. Misalnya, siswa berharap akan kepandaian. Maka siswa melakukan berbagai kegiatan agar pandai. Kegiatan manusia pada dasarnya digerakkan atau didorong oleh nilai.

b. Jenis-Jenis Nilai

Menurut Notonegoro, (1983 : 26) menyatakan bahwa ada tiga macam nilai, yaitu :

- a. Nilai materiil, yakni sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- b. Nilai vital, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan.
- c. Nilai kerohanian, dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :
 1. Nilai kebenaran bersumber pada akal pikiran manusia (rasio, budi, dan cipta)
 2. Nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia.
 3. Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras, keras hati, dan nurani manusia.
 4. Nilai religius (ketuhanan) yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia.

Berbeda dengan jenis nilai-nilai yang dikemukakan oleh. Notonegoro, jika dilihat dari segi filsafat, nilai dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yakni diantaranya:

a. Nilai logika yaitu benar – salah

Nilai logika yaitu nilai mengenai benar atau salahnya tindakan/kejadian. Dalam hal ini nilai logika berkaitan dengan tindakan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh seorang siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian ia berhasil menjawab dengan benar, maka secara logika jawaban tersebut dianggap benar bukan baik, dan ketika jawabannya keliru maka secara logika jawaban tersebut dianggap salah bukan buruk.

b. Nilai etika, yaitu nilai tentang baik – buruk

Nilai etika adalah nilai tentang baik buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi, jika kita mengatakan etika orang itu buruk, bukan berarti wajahnya buruk, tetapi menunjuk perilaku orang itu buruk. Nilai etika adalah nilai moral. Jadi, moral yang di maksudkan disini adalah nilai moral sebagai bagian dari nilai.

c. Nilai estetika yaitu nilai tentang indah – tidak indah

Selain etika, kita juga mengenal pula estetika. Estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, penampilan fisik, bukan nilai etika. Nilai estetika berkaitan dengan penampilan, sedangkan nilai etika atau moral berkaitan dengan perilaku manusia.

Nilai dapat menunjukkan sifat dan kualitas atas sesuatu yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nilai juga dapat dijadikan landasan dalam berperilaku dan berucap baik yang disadari maupun tidak. Setiap wilayah atau daerah pasti memiliki nilai-nilai yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Dapat disimpulkan nilai adalah segala sesuatu yang baik, berdaya guna sekaligus yang menganggap baik atau buruk, indah atau tidak indahnya suatu objek. Nilai juga menunjukkan hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik kehidupan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

2. Konsep budaya

Menurut Soekanto (1996 : 188) budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* (budi atau akal) kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai hal-hal asing yang sama diartikan dengan kebudayaan yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Tubbs dan Moss (2001:273) menjelaskan bahwa sebuah budaya dapat berubah dan berevolusi dari waktu ke waktu namun seperangkat karakteristik dimiliki bersama oleh sebuah kelompok secara keseluruhan dan dapat dilacak, meskipun telah berubah banyak dari generasi ke generasi.

Dengan demikian budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi. Sehingga bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri yang menggambarkan suatu proses yang mengikat setiap orang segera setelah kita lahir di dunia.

3. Konsep Kearifan Lokal Lampung

Ridwan (2007: 2) Secara etimologis, kearifan berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Dengan kata lain kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat.

Menurut Abdul Syani 2013 Piil adalah melekat pada diri kepribadian dengan menjaga harga diri, moral dan menghindari rasa malu. Pesenggiri adalah menjaga kehormatan. Secara ringkas Piil pesenggiri dapat diartikan sebagai Kepribadian yang menjunjung kehormatan.

Sedangkan menurut kitab kuntara rajaniti piil pesenggiri diartikan, sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik martabat secara pribadi maupun

secara berkelompok senantiasa dipertahankan. dalam hal tertentu orang Lampung dapat mempertaruhkan apasaja demi mempertahankan piil pesenggiri tersebut. adapun semua penejelasan unsur-unsur kearifan lokal (piil pesenggiri) sebagai berikut:

a. Juluk-Adok

Juluk-adok (gelar adat) yang masing-masing mempunyai makna Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang laki/perempuan yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama panggilan adat seorang laki/perempuan yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat.

Juluk-adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu juluk-adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan juluk-adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya. Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

b. Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda “simah”, kemudian menjadi kata kerja “nyimah” yang berarti suka memberi (pemurah). nemui-nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan.

Untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

c. Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyappur berasal dari kata benda cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau berbaur. dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama.

Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap

suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa toleransi yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial.

d. Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

C. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya.

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008 :122) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Pemerintah desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-

pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2014 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

D. Tugas Pemerintahan Desa

Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung di bawah camat. Tugas kepala desa adalah menjalankan urusan rumah tangga desanya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa termasuk didalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintahan, dalam hal ini Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan urusan

pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintahan desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pemerintahan desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pemerintahan desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya Kepala Desa Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

E. Kerangka Pikir

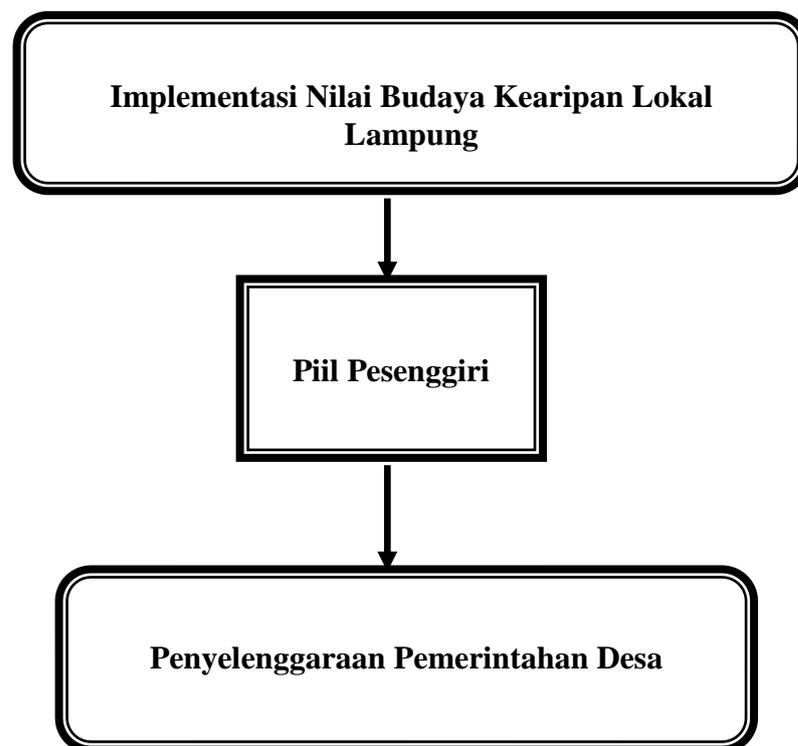
Setelah dilakukan penguraian maka implementasi nilai budaya kearifan lokal lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kerangka pikir merupakan alat bantu penulis untuk memahami pokok masalah yang akan diteliti. Implementasi itu merupakan penerapan dari *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. agar pelaksanaan pemerintahan desa itu dilaksanakan maka dilakukan pendekatan secara pengukuran organisasi dilihat berdasarkan pendekatan sasaran, merupakan pusat perhatian dalam mengukur keberhasilan dari output.

Pendekatan sumber, mengukur organisasi dari input yang mengutamakan keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Pendekatan proses, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program yang dilakukan oleh aparat desa baik secara internal maupun eksternal. Pendekatan integrative, pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output.

Agar lebih dapat meningkatkan lagi maka perlu mengadopsi melibatkan nilai – nilai budaya kearifan lokal lampung dalam hidup berprinsip yang menyangkut tentang hal piil pesenggiri yaitu prinsip kehormatan diantaranya, juluk-adok, orang yang mempunyai gelar adat prinsip kebaikan mengajak mengayomi asas identitas sebagai sumber motivasi bagi masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajiban dalam pelayanan sehingga dengan prinsip itu harus dijalan melalui penyelenggaraan pemerintah desa.

Nemui-nyimah, dengan melibatkan prinsip nilai ramah tamah terhadap tamu sehingga yang dilayani merasa puas dengan ini diharapkan dalam pelaksanaannya untuk menjaga silaturahmi. nengah-nyappur, apaun yang terjadi nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat harus ikut partisipasi, dengan adanya partisipasi semua pihak maka pelayanan akan lancar. sakai-sembayan, tolong menolong merupakan hak dan kewajiban orang lampung dengan demikian masyarakat akan mendongkrak penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas diagram kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Nilai Budaya Kearifan Lokal Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Dalam buku Sugiyono (2013 : 15) Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara teknik purposive sampling secara sengaja mengambil sampel tertentu yang telah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan sipat – sipat, karakteristik, ciri dan kriteria: hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Metode ini diharapkan dapat mengungkap peristiwa riil dilapangan bahkan mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi yang ada dipenelitian ini.

Penulis mengungkapkan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, dimana penelitian ini mendeskripsikan tentang keadaan secara faktual tentang Implementasi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa serta nilai – nilai budaya kearifan lokal piil pesenggiri yang ada di masyarakat desa negeri besar dikecamatan negeri besar kabupaten way kanan, serta implementasi-implementasi nilai budaya kearifan lokal Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa negeri besar kecamatan negeri besar kabupaten way kanan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008: 219) adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Moeleong (2000: 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian

Adapun alasan peneliti memilih desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 oktober sampai 14 2016. sebagai lokasi penelitian dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada wilayah tersebut,relatif banyak anggota masyarakat Lampung yang masih terikat dengan nilai - nilai kearifan lokal piil pesengiri
- b. Masyarakat setempat cukup dikenal sehingga mudah dilakukan dalam pendekatan
- c. Karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti sehingga bisa menghemat biaya dalam penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, fokus penelitian sangatlah penting untuk membatasi masalah-masalah yang akan diteliti agar tidak melimpah ruah walaupun sifatnya masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Iskandar (2008: 195) bahwa masalah penelitian survei perlu dibatasi melalui fokus penelitian karena, suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong tetapi berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah, penetapan fokus penelitian dapat membatasi apa yang ingin diteliti karena fenomena-fenomena yang terjadi bersifat holistik, fokus penelitian berfungsi untuk

memenuhi kriteria informasi yang diperoleh dilapangan fokus penelitian ini masih bersifat sementara

Fokus penelitian ini adalah nilai budaya kearifan lokal piil pesenggiri Lampung (juluk adok, Nemui nyimah, Nengah nyappur, Sakai sambaiyan) selanjutnya implementasi nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mengetahui banyak tentang latar penelitian dan bersedia menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moeloeng, 1989 : 132). Menurut Iskandar (2008 : 219) dengan mengutip pendapat dari Spradley mengemukakan bahwa informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Sederhana, hanya terdapat situasi sosial tunggal
- b. Mudah memasukinya
- c. Tidak payah dalam melakukan penelitian, mudah memperoleh izin, kegiatannya terjadi berulang – ulang

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan oleh penulis yang sesuai dengan kriteria yang menyangkut dengan penelitian tersebut sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat berdasarkan teknik yang dipakai, Menurut Sugiyono (2013: 218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun teknik yang dipakai penulis adalah *purposive sampling* guna untuk memudahkan penulis dalam menentukan informan dalam penelitiannya di desa negeri besar kecamatan negeri besar kabupaten way kanan. dari penjelasan diatas maka informan dalam penelitian ini dipilih dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Kepala desa negeri besar (Endang Sumarni)
- b. Tokoh adat/peyimbang adat desa negeri besar (Ahmad Darwis)
kabupaten way kanan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang nilai budaya kearifan lokal lampung yang ada di masyarakat negeri besar
- c. Masyarakat asli orang lampung (Ahmad Zaili) yang berpengalaman dan mengikuti kegiatan yang ada desa negeri besar.
- d. Aparat desa yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Zubaidah dan Suhardi negeri besar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Menurut Cholid Narbuko (2003 : 83) metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya.

Wawancara dalam penelitian penulis ini digunakan untuk mengetahui secara detail tentang apa yang diketahui orang – orang yang akan diwawancara, kepala desa, tokoh adat, masyarakat dan aparat desa mengenai keberadaan atau penerapan nilai budaya lokal lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di masyarakat desa negeri besar. Wawancara mendalam ini diharapkan akan mendapatkan informasi yang jelas sehingga memudahkan peneliti dalam mengkajinya.

Dari penjelasan diatas maka informan dalam penelitian ini dipilih dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Kepala desa negeri besar (Endang Sumarni)
- b. Tokoh adat/peyimbang adat desa negeri besar (Ahmad Darwis) kabupaten way kanan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang nilai budaya kearifan lokal lampung yang ada di masyarakat negeri besar
- c. Masyarakat asli orang lampung (Ahmad Zaili) yang berpengalaman dan mengikuti kegiatan yang ada desa negeri besar.
- d. Aparat desa yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Zubaidah dan Suhardi negeri besar.

2. Observasi

Observasi adalah (pengamatan) alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki Narbuko (2003: 83). Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki peran yang besar dalam proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena teknik pengamatan didasarkan atau pengalaman langsung, memungkinkan peneliti melihat atau mengamati sendiri, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data Moleong, (2002: 51).

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan implementasi nilai budaya kearifan lokal lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam observasi ini peneliti menemukan adanya kearifan lokal yang sangat kental dalam masyarakat sehingga observasi ini dilakukan pengamatan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan kegiatan turun lapangan pada bulan oktober lalu tahun 2016

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang

dimaksud diantaranya adalah buku, website budaya lampung, memuat tentang arsip pelayanan dan foto yang digunakan untuk mengambil gambar informan saat melakukan wawancara. yang memuat tentang implementasi nilai budaya lokal Lampung, penyelenggaraan pemerintahan, skripsi yang memuat tentang budaya lampung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992: 16-19) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data – data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penulis turun lapangan pada bulan oktober lalu 2016 data arsip

pemerintahan pembangunan, bantuan, administrasi desa serta data – data penduduk desa. kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi nilai budaya
- b. kearifan lokal lampung
- c. Peyelenggaraan pemerintahan desa.

3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan – kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakannya, dan kecocokan, yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya. Pada tahap ini penulis, menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat penelitian. Kemudian data ini akan diuji kebenarannya setelah dilakukan pencocokkan data sebelumnya setelah itu dilakukan tarik kesimpulan tentang implementasi nilai budaya kearifan lokal lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa negeri besar kecamatan negari besar kabupaten way kanan.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Negeri Besar

Desa Negeri Besar pertama kali bernama Negeri Syam yang terbentuk sejak tahun 1945. Terbentuknya Desa Negeri Besar saat ini merupakan pemekaran dari kecamatan negeri besar yang dulu dikenal dengan Lingkungan IV dan V Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Asal usul Terbentuknya desa negeri besar ini pertama kali datang lah seorang tamu dari luar yang mengawali pertama kali masyarakat Negeri Besar menghuni kelurahan ini dan tamu tersebut bernama bernama Serunting Sakti. Serunting sakti ini mulai membentuk Negeri Besar pertama kali dengan diberi nama umbul. Dari umbul tersebut berdiri lah tujuh suku yang dibagi oleh Serunting Sakti ini, Sehingga ketujuh suku tersebut bermusyawarah dan sudah adanya kesepakatan dengan tujuh suku tersebut untuk membentuk kampung Negeri Besar, jadi terbentuklah kampung Negeri Besar.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2001 tentang penghapusan, pembentukan dan penggabungan Kecamatan serta Desa dalam

Kabupaten way Kanan, maka terbentuklah Desa Negeri Besar dengan pusat administrasi pemerintahannya berkedudukan di Jalan Serunting Sakti No. 1 Desa Negeri Besar. Saat ini jumlah lingkungan Desa Negeri Besar Berjumlah 5 lingkungan dan memiliki 45 RT.

Adapun Lurah Negeri Besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Nama Kepala Desa Negeri Besar

No	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat	Tahun Berakhir Menjabat
1	Depati Mangkurat	1945	1980
2	Raja Wali	1980	2001
3	Santoni	2001	2008
4	Herman	2008	2014
5	Endang Sumarni (Pjs)	2014	2016

Sumber: Monografi Desa Negeri Besar tahun 2016

B. Keadaan Umum Wilayah Desa Negeri Besar

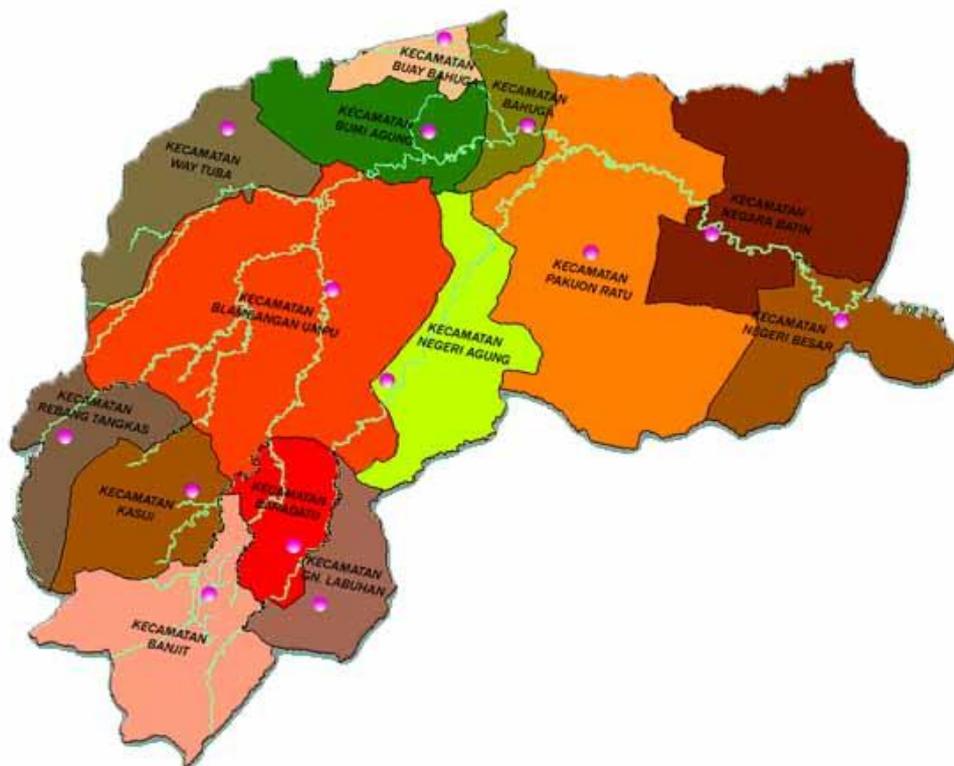
1. Luas dan Batas Wilayah Desa Negeri Besar

Dalam monografi Desa Negeri Besar tahun 2016, luas tanah Desa Negeri Besar adalah 14.631 Ha, dengan ketinggian 200 M dari permukiman sungai. Tanah ini merupakan hibah dari masyarakat dan dibangun dari bantuan APBD Kabupaten Way Kanan. Adapun batas wilayah dan peta Desa Negeri Besar dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Negeri Besar

NO	Batas Wilayah Sebelah	Nama Teman Berbatas
1	Utara	Way Mesuji
2	Selatan	Kali Way Papan Lunik
3	Barat	Kampung Kali Awi
4	Timur	Kampung Tiuh Baru

Sumber: Monografi Desa Negeri Besar tahun 2016



Gambar 2. Peta Kabupaten Way Kanan

2. Orbitrasi Desa Negeri Besar

Jarak tempuh dari Desa Negeri Besar ke pusat pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Jarak pemerintah Desa Negeri Besar dengan Kecamatan Negeri Besar 1 km.

- b. Jarak dengan pemerintah kabupaten Way Kanan 120 km.
- c. Jarak dengan pemerintah provinsi Lampung 180 km.

C. Keadaan Penduduk Desa Negeri Besar

1. Keadaan Umum Penduduk

Jumlah penduduk Desa Negeri Besar pada tahun 2016 adalah 2682 jiwa, yang terdiri dari 1372 jiwa laki-laki dan 1310 jiwa perempuan. Secara terperinci jumlah penduduk Desa Negeri Besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Negeri Besar Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-laki	1372	50,90 %
2	Perempuan	1310	50,10%
Jumlah Penduduk		2682	100%

Sumber: Monografi Desa Negeri Besar tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Negeri Besar masih dalam keadaan seimbang terbukti jumlah penduduk laki-laki adalah 50,90% sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 50,10%. Dengan demikian selisih antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah 0,10%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah seluruh penduduk di Desa Negeri Besar Kabupaten way kanan seimbang tetapi jumlah penduduk

laki-lakinya yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Desa Negeri Besar.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Dilihat dari agama yang dianut oleh masyarakat Desa Negeri Besar hanya terdiri dari 2 agama yaitu agama Islam dan Kristen. Mengenai jumlah penduduk Negeri Besar berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	2676	99,74%
2	Kristen	6	0,25%
Jumlah Keseluruhan		2682	100%

Sumber: Monografi Desa Negeri Besar Negeri Besar tahun 2016

Dari keterangan tabel 7, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Negeri Besar menganut agama Islam dengan persentase 99,74%, selain menganut agam Islam masyarakat di Desa Negeri Besar menganut agama Kristen sebanyak 6 jiwa. Untuk yang menganut agama lain di Desa Negeri Besar tidak ada karena hampir semuanya penduduk di Desa Negeri Besar menganut agama islam.

3. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur

Keadaan penduduk Desa Negeri Besar berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-4 tahun	195	7,28%
2	5-6 tahun	107	3,99%
3	7-13 tahun	334	12,45%
4	14-16 tahun	181	6,76%
5	17-24 tahun	519	19,35%
6	25-54 tahun	1028	38,32%
7	55 tahun ke atas	318	11,85%
Jumlah Penduduk		2682	100%

Sumber: Monografi Desa Negeri Besar Tahun 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk sebagian besar berusia produktif yaitu usia antara 25-54 tahun sebanyak 1028 jiwa, untuk usia belum produktif yaitu usia antar 5-24 tahun berjumlah 1336 jiwa dari jumlah penduduk. Sedangkan usia sudah produktif 55 tahun keatas berjumlah 319 jiwa.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Negeri Besar hampir sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan, tukang dan pedagang meskipun ada pula yang bekerja sebagai PNS dan lain-lain. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	40	2,60%
2	Dagang	31	2,02%
3	Petani	627	40,90%
4	Nelayan	308	20,09%
5	Tukang	14	0,91%
6	Pensiunan	8	0,53%
7	Wiraswasta	505	32,95%
Jumlah Penduduk		1533	100%

Sumber: Monografi Desa Negeri Besar Tahun 2016

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Desa Negeri Besar bermata pencaharian sebagai petani 40.90%, untuk bermata pencaharian wiraswasta 32,95%, untuk penduduk yang bermata pencaharian nelayan 20,09%, sedangkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS, Dagang, Tukang, Pensiunan 93 orang.

5. Sarana dan Prasarana Desa Negeri Besar

Desa Negeri Besar mempunyai sarana dan prasarana, yaitu:

- a. Sarana peribadatan seperti masjid dan mushollah.
- b. Sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan volly, lapangan bulu tangkis dan lapangan tenis meja.
- c. Sarana kesehatan, seperti puskesmas dan bidan.

- d. Sarana pendidikan, seperti pendidikan umum yaitu Taman Kanak-Kanan (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 7. Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	5	18,51%
2	Sarana Olahraga	7	25,92%
3	Sarana Kesehatan	4	14,81%
4	Sarana Pendidikan	11	40,74%
Jumlah		27	100%

Sumber : Monografi Desa Negeri Besar tahun 2016

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Negeri Besar memiliki 5 bangunan masjid yang terletak di Lingkungan I berjumlah 1 bangunan, Lingkungan II berjumlah 1 bangunan, Lingkungan III berjumlah 1 bangunan, Lingkungan IV berjumlah 1 bangunan dan lingkungan V berjumlah 1 bangunan. Untuk sarana olahraganya seperti lapangan sepak bola berjumlah 2 lapangan, lapangan volly berjumlah 2 lapangan, lapangan bulu tangkis berjumlah 1 lapangan, sedangkan lapangan tenis meja berjumlah 2 lapangan.

Sarana kesehatan di Desa Negeri Besar memiliki 4 tempat untuk sarana kesehatan, Lingkungan I memiliki sarana kesehatan 1, Lingkungan II memiliki sarana kesehatan 1, Lingkungan III memiliki

sarana kesehatan 1, Sedangkan Lingkungan IV dan V sarana kesehatannya di gabung menjadi 1.

Di Desa Negeri Besar memiliki 27 bangunan sarana pendidikan dengan rincian yaitu Taman Kanak-Kanak memiliki 2 bangunan, Sekolah Dasar (SD) memiliki 5 bangunan, Sekolah Menengah Pertama memiliki 2 bangunan, Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki 2 bangunan sarana pendidikan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di Bab v sebelumnya, Kearipan lokal lampung secara substansial merupakan nilai dan norma juluk adok orang lampung tetap melekat pada pribadi seseorang sehingga nilai juluk adok ini akan terus jadi turun temurun dalam keluarganya baik diluar maupun dilingkungan sendiri serta instansi pemerintahan desanya masih menggunakan gelar juluk adok sudah ada tatanan dalam piil pesenggiri orang lampung dan tidak akan hilang. bagi jajaran aparat pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik mereka yang mempunyai gelar adat atau mereka yang menyandang gelar adat pada umumnya mempunyai prinsip nilai kearipan lokal piil pesenggiri yakni dengan dilaksanakannya tugas sesuai dengan tupoksinya sebagaimana hak dan kewajibannya yang melekat dalam gelar adat maupun gelar formal. Dengan demikian aparat desa yang proporsional sesuai dengan gelar pendidikannya dan keahlian.

Dari segi unsur nemui nyimah pada umumnya aparat pemerintahan desa dapat melayani masyarakat dengan sikap dan perilaku yang ramah dan terbuka hal ini dapat diketahui meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

aparatus pemerintahan desa Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Implementasi Nengah Nyappur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagian besar sesama aparatus pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan baik begitu juga sesama anggota masyarakat aparatus desa bekerja sama saling peduli dan pengguna jasa dengan prinsip semangat toleransi dan peduli terhadap pelayanan masyarakat Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan.

Implementasi Sakai sambaiyan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagian aparatus pemerintahan desa dalam pelayanan publik cenderung membangun praktek tolong menolong dan gotong royong menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Pada umumnya keterikatan aparatus desa terhadap nilai piil pesenggiri itu cukup memadai sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diadopsi sebagai unsur memperlancar pelayanan publik. Diantara keempat indikator yang dipakai paling dominan dilaksanakan dalam masyarakat yakni sakai sambaiyan yang dilakukan dalam kegiatan sehari – hari baik segi sosial,

ekonomi, adat istiadat, serta pemerintahan desa setempat. Selanjutnya nemui nyimah yakni kegiatan masyarakat yang saling berkomunikasi satu sama lain sehingga terjadinya kerukunan antar sesama masyarakat sehingga adanya nilai nemui nyimah memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjalan silaturahmi baik dari pemerintah daerah setempat dan instansi desanya sendiri.

Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa negeri besar sudah bisa dipastikan berjalan dengan baik dengan adanya program – program yang ada di desa berjalan sesuai dengan aturan dan didukung dengan nilai budaya adat istiadat masyarakat negeri besar sangat kuat sehingga tidak menutup kemungkinan aparat desa tidak akan melakukan penyelewengan program – program yang telah berjalan.

B. Saran

1. Kearifan lokal lampung yang ada dimasyarakat saat ini agar dapat terus mengedepan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga terjalin kerukunan antar sesama masyarakat terlebih lagi pada pemerintah desa dalam pelayanan publik.
2. Pemerintahan desa negeri besar agar berdaya saing dengan desa lain dari segi adat istiadat lebih diperkuat pembangunan serta infrastruktur desa mendorong agar masyarakat lebih maju sumber daya manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Abdullah. 2008. *Kamus Bahasa (Lampung – Indonesia, Indonesia – Lampung)*. Bandar Lampung.
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. 2001. *Ilmu pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Bambang Daroeso. 1986. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Cholid Narbuko. Dkk. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dept P & K RI, 1977/1978. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta.
- Fathoni, Abdurahman. 2006. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. Jakarta: RinekaCipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Handayaniingrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Iskandar, Dr. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : GP Press.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI-Press.

- Kusnadi, dkk. 2002 *Pengantar Manajemen*. Universitas Brawijaya Malang. Bandung
- Lubis, Hari S.B. dan Martani Huseini. *Teori Organisasi*., Pusat Antar Universitas Ilmu- Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta. 1987
- Miles, M.B., Hubrman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Moleong, Lexy J. (1989) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Notonegoro, 1983. *Sejarah dan Nilai Tradisional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Direktorat. Jakarta.,
- Soekanto, Soejono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Grafisi Press. Jakarta
- Soelaeman Munandar. 2007. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabetta
- Tubbs, Stewart dan Sylvia Moss. 2001. *Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Referensi lain :

- Abdulsyani. 2013.*Keterampilam Dan Karya Budaya Masyarakat Adat Lampung* . (Di akses pada tanggal 30/juni/2016 pukul 14.32 WIB) <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/77-2/>
- Ridwan, N.A. (2007). “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol.5, (1), 27-38.
- Ibrahim Rahmat. 2013.*Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya*. Diakses pada 13/Mei/2016.<http://bahimrahmat.blogspot.com/2013/05/pengertian-konsepnilai-dan-sistem.html>

No 6 Undang – Undang tahun 2014 tentang pemerintahan desa

<http://fikryfikry.blogspot.co.id>

<http://waykanan.go.id/berita-24-peta-way-kanan.html> (akses tanggal 23/12/2016
pukul 20:48 WIB)